



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah pada level aktivitas operasional perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kota Bitung telah melaksanakan penilaian risiko level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memerhatikan :
1. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kab/Kota Sulut tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Aktivitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Aktivitas;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 43/PK.01-BA/71/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:
- a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Penetapan Tujuan Level Aktivitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
 - g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.
- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam melakukan kegiatan pengendalian level aktivitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Bitung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 2 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
I	EKSTERNAL				
1	Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kurang memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		Komunikasi antar lembaga	Perbedaan pemahaman	Implementasi dalam penegakan aturan tidak maksimal	Sda
		Birokrasi	Keterlambatan dalam pengambilan keputusan	KPU tidak maksimal dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan birokrasi eksternal	Sda
		Pelanggaran Administrasi Pemilu	Tidak Memenuhi syarat sebagai peserta pemilu	Sengketa pemilu	Sda
		Pembagian Wilayah	Konflik administrasi kewilayahan	Mal administrasi	Sda
		Relokasi Pemukiman Penduduk	Pemilih tidak menggunakan hak pilih	Turunnya partisipasi pemilih di daerah tersebut	Sda
		Penerapan sosial distancing	Terganggunya interaksi sosial didalam kehidupan bermasyarakat	kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024	Laporan Penyelenggaraan Pemilihan 2020
		Belum ditetapkannya program tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024	Terciptanya opini, asumsi dan wacana yang beragam dikalangan masyarakat	Terjadi kegamangan ditengah masyarakat atas ketidak pastian pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024	Perkembangan RDP Penyelenggara Pemilu dengan DPR dan Pemerintah di Akhir Tahun 2021
		Partai Politik yang mempengaruhi keputusan dari KPU	KPU tidak mandiri dalam mengambil keputusan	Personil KPU tidak netral dalam mengambil keputusan, berpotensi mendapatkan sanksi kode etik	Laporan Tahunan DKPP Tahun 2019-2021
2	Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Tidak adanya dukungan fasilitasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak berjalannya kegiatan Non Pemilu/Pemilihan	Laporan KPU Kabupaten/Kota

			Hanya sebagian kecil masyarakat yang peduli atas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024	Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilihan 2020 di Masa Pandemi
3	Lingkungan	Daerah rawan bencana	Adanya ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS	Berkurangnya partisipasi masyarakat pengguna hak pilih	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		Letak geografis	Keterlambatan distribusi logistik untuk daerah kepulauan	Tertundanya pelaksanaan pemungutan suara	Sda
		Daerah padat penduduk	Gangguan kamtibmas	Terganggunya tahapan pemilihan	Sda
		Penggunaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Akan semakin banyak pohon-pohon yang digunakan dalam logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024	Potensi bencana alam dan menghambat Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Sda
4	Keuangan	Anggaran Pemilihan	Anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan	Pencermatan dan optimalisasi anggaran kegiatan	Sda
			Keterbatasan anggaran	Berkurangnya volume sejumlah kegiatan misalnya sosialisasi dan rakordengan pihak stakeholder	Sda
		Mekanisme Revisi Anggaran	Kebijakan yang sering berubah	tidak maksimalnya pelaksanaan tahapan	Sda
5	IT & Infrastruktur	Jaringan Internet	Gangguan jaringan	Terhambatnya Penerimaan dan pengiriman informasi	Sda
		Keamanan Cyber	Terjadinya gangguan akses teknologi informasi	Terlambatnya penyampaian informasi ke masyarakat melalui jaringan IT	Materi Webinar Keamanan Cyber
II	INTERNAL				
1	Strategik	Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Belum ada kepastian jadwal, tahapan, program dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024	Dis-informasi terkait jadwal, program dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024	Perkembangan dan diskusi media

2	Personil	kekurangan personil	Tidak meratanya distribusi pegawai di tiap-tiap sub bagian	Beban kerja bertambah,	Analisis SDM
		Kemampuan atau Kompetensi Personil	Kompetensi tidak merata di semua bagian	Produktifitas pegawai menurun	Evaluasi SDM
		Koordinasi dan Komunikasi antara Pimpinan dan Staf	Koordinasi tidak berjalan dengan baik	turunnya Kinerja Pegawai dan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	Hasil FGD internal
3	Proses	Kegiatan Tahapan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Perubahan tahapan, program dan Jadwal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Persiapan dan pelaksanaan yang kurang maksimal	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
			Regulasi Teknis terlambat ditetapkan	mengakibatkan Legitimasi suatu keputusan yang tidak efektif	Sda
			Tidak adanya Dasar Hukum Asuransi Badan Adhoc	Anggaran Asuransi bagi badan Adhoc	Sda
4	IT dan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana	keamanan server yang kurang memadai	Terhambatnya proses digitalisasi data	Materi Webinar Keamanan Cyber
5	Keuangan	Keterbatasan Anggaran Pemilu Tahun 2024	Kurang maksimal dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024	Berpotensi terjadinya gugatan/sengketa Pemilu Tahun 2024	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				Bisa mengganggu Partisipasi Masyarakat dalam memilih dalam Pemilu Tahun 2024	Sda
6	Informasi	Media Sosial, media online	Kurangnya Informasi dan Pemberitaan terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Terhambatnya informasi ke masyarakat	Sda
		Misinformasi, Hoaks	masih terjadinya misinformasi dan hoaks di media sosial dan Media Online	Masyarakat sering menerima informasi yang berbeda atau tidak sesuai fakta	Sda

Keterangan:

1. Kolom (a) diisi nomor urut.
2. Kolom (b) diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.
3. Kolom (c) diisi dengan topik risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; untuk kategori Sosial Politik adalah adanya peraturan-peraturan yang membatasi peran KPU.
4. Kolom (d) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (c).
5. Kolom (e) diisi uraian dampak berdasarkan potensial risiko pada kolom d
6. Kolom (f) diisi jika ada referensi yang digunakan dalam pengisian formulir

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,
ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN
2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO						
LEVEL / SKALA	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan				
1	Sangat Kecil/Jarang	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20%				
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%				
3	Kemungkinan Sedang/ Moderat	Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%				
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80%				
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%				
B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO						
LEVEL / SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugian finansial	Polusi ringan/Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugian finansial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan)
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugian finansial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penanganan medis	Dampak Hukum Sedang (Peringatan Keras/ Pidana ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugian finansial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (Pemberhentian dari jabatan/ PSU/kurungan badan)
5	Sangat besar/ Katastrok	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian finansial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrok	kematian	Dampak hukum sangat besar (Pemberhentian tetap/ ancaman pidana lebih dari 5 tahun)

C. LEVEL RISIKO: HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK				
Range	Warna	Level Risiko		Tindakan yang diambil
13-25	MERAH	4	Ekstrim	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)
9-12	ORANGE	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)
6-8	KUNING	2	sedang	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supliementary Issue</i>)
1-5	BIRU	1	rendah	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Katartrofik	5 Acceptable	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
Besar (4)	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	16 Unacceptable	20 Unacceptable
Sedan (3)	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable
Kecil (2)	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues
Tidak Signifikan (1)	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
	Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
	Probabilitas/Likelihood				

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 2 Juni 2022

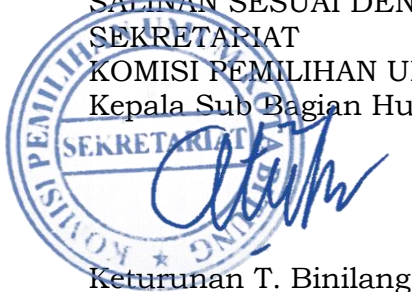
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

Unit Pemilik Risiko		: Sekretariat KPU KOTA BITUNG			
Periode Penerapan		: 2022			
No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan	
1	2	3	4	5	
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kab/Kotadengan lembaga riset kepemiluan	Kegiatan kerjasama riset kepemiluan di tingkat KPUKab/Kota belum terprogram	
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Kompetensi pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi penugasannya	
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kab/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak semuanya berfungsidengan baik	
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kab/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPUKab/Kota dan KPU Kabupaten/Kota	Nilai akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota belum merata	
				Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kab/Kota	Masih ada temuan berdasarkan LHP BPK terhadap LK maupun hasilaudit kinerja
				Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kab/Kota	Nilai evaluasi reformasi birokrasi masih belum sesuai harapan
		Terwujudnya Data Pemilihsecara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Masih ada KPU Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu melaksanakan program pemutahiran data pemilih	
1.1	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi KerjasamaDengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Tidak adanya kerjasama dengan instansi terkait dalamrangka penguatan kelembagaan demokrasi	
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencanakerja yang telah ditetapkan	Tidak terlaksananya revisi terhadap rencana kerja dananggaran	
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif danefisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepatwaktu	Laporan monev program dan anggaran masih kurang akuntabel dan tidak tepatwaktu	
Persentase target kinerja KPU Kab/Kota dan KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Masih ada komponen penilaian kinerja atau targetkinerja yang tidak tercapai sesuai perjanjian kinerja				
1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Masih adanya pegawai yang terlambat mendapatkan pelayanan kepegawaian dan layanan kepegawaian yang tidak akurat	
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Penegakan disiplin pegawai tidak dilaksanakan	
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Seleksi pegawai tidak terlaksana secara transparandan akuntabel	

			Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) belum sesuai Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Fasilitasi Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan periode masa jabatan (terlambat)
			Persentase Fasilitasi Jumlah Anggota KPU Kab/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	Proses PAW Anggota KPU Kab/Kota tidak sesuai dengan periode masa jabatan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Tidak semua pegawai datanya tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	Tidak adanya rancangan kebijakan (SOP) di bidang kepegawaian
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	Jabatan fungsional tata kelola pemilu tidak terisi
		Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	Badan adhoc terlambat dibentuk
1.3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kab/Kota	Pertanggungjawaban keuangan belum sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kab/Kota	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BMN belum dikelola sesuai dengan perundang-undangan
1.4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kab/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	Belum tersusunnya rancangan keputusan KPU Kab/Kota tentang kearsipan
	Sarana Prasarana Kantor		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kab/Kota	Arsip yang dikelola belum sesuai dengan jadwal retensi arsip (JRA)

		Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kab/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker KPU Kab/Kota
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Fasilitas kantor tidak berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Gedung dan gudang KPU Kab/Kota tidak berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kab/Kota	Notulensi dan dokumentasi Rapat Pleno Rutin tidak diselesaikan tepat waktu
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kab/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab/Kota yang dapat ditanggulangi	Gangguan keamanan tidak dapat ditanggulangi
1.5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kab/Kota	Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kab/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kab/Kota	Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP tidak ditindaklanjuti
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	KPU Kabupaten/Kota tidak tepat waktu menyampaikan kartu kendali SPIP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kab/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kab/Kota	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) tidak sesuai target peningkatan
1.6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kab/Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Belum semua pegawai mengikuti diklat peningkatan kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU Kab/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	PNS yang mengikuti program studi tata kelola pemilu dan program studi prioritas lainnya (IT, Akuntansi dan Hukum) tidak selesai sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian dalam rangka Reformasi Birokrasi	Tidak adanya kajian internal dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	Riset dan jurnal kepemiluan tidak ada

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
II	PROGRAM PENYELENGGA- RAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab/Kotayang disusun dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan KerangkaRegulasi KPU	Keputusan KPU Kab/Kota disusun tidak tepat waktu sesuai SOP
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Satker KPU Kabupaten/Kota menyediakan logistik pemilu/pemilihan di TPS tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Tahapan pemilu/pemilihan dilaksanakan tidak sesuai jadwal
2.1	Penyusunan Peraturan Perundang- undangan	Tersusunnya Keputusan KPU Kab/Kota dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kab/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Keputusan KPU Kab/Kota disusun tidak sesuai dengankerangka regulasi
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dandisajikan sesuai SOP	Produk hukum tidak dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai SOP
2.2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Prosentase penurunan Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kab/Kota	masih didapati adanya sengketa hukum
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab/Kota	Sengketa hukum tidak dimenangkan KPU Kab/Kota
2.3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Satker KPU Kab/Kota dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU	Satker KPU Kab/Kota dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal oleh KPU
			Persentase KPU kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	KPU Kabupaten/Kota belum memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kab/Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Proses PAW anggota DPRD Kab/Kota tidak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Calon peserta Pemilu tidak dapat difasilitasi

		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Tidak adanya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung tata Kelola KPU
		Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Tidak adanya dokumen SOP pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan
2.4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kab/Kota dan KPU Kab/Kota	KPU Kab/Kota tidak membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
			Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Rumah Pintar Pemilu tidak dilakukan digitalisasi
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota	Tidak semua kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum yang terlaksana
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Tidak semua permohonan informasi yang ditindaklanjuti PPID sesuai SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab/Kota serta media massa.	tidak semua informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan dimuat di laman atau media sosial KPU Kab/Kota serta media massa.
2.5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	KPU Kabupaten/Kota mengalami permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	KPU Kabupaten/Kota yang Terdapat kasus oleh KPU Kabupaten/Kota dalam logistik Pemilu/Pemilihan yang mana kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	KPU Kab/Kota mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tidak tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/ Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	Penyediaan logistik Pemilu tidak secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu
2.6	<i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i>	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Program Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan belum Maksimal
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi tidak aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota	Aplikasi KPU belum terintegrasi di KPU Kota

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 2 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO / INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : *Sekretariat KPU KOTA BITUNG*

Periode Penerapan : **2022**

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kab/Kota dengan lembaga riset kepemiluan	Kegiatan kerjasama riset kepemiluan di tingkat KPU Kab/Kota belum terprogram	Tidak adanya anggaran untuk program riset kepemiluan di tingkat KPU Kab/Kota	Kabag TPP Partisipasi, Hukum, Humas dan SDM/ Kasubag Hk dan SDM	Anggaran di masa Covid yang terbatas	internal	C	Sasaran kinerja tidak tercapai	KPU Kab/Kota Sulut	Melaksanakan riset mandiri serta membuka ruang kerjasama dengan lembaga lainnya	Tidak adanya anggaran untuk program riset kepemiluan di tingkat KPU Kab/Kota	Keuangan
2	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Kompetensi pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi penugasannya	Pengetahuan terkait bidang penugasan masih belum merata	sda	Belum semua pegawai mengikuti Bimtek/Diklat terkait penugasannya, adanya perkembangan kebutuhan kompetensi teknis seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta adanya mutasi ke bagian lainnya	internal	C	Kinerja pegawai tidak optimal	KPU Kab/Kota Sulut	Melaksanakan/ mengikutsertakan pegawai dalam Bimtek/Diklat teknis terkait bidang penugasannya	Pengetahuan terkait bidang penugasan masih belum merata	Operasional

3	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak semuanya berfungsi dengan baik	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak konsisten dilakukan	Kabag KUL/Kasubag Umum	1) Tidak adanya dokumen SOP mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana; 2) Keterbatasan anggaran	internal	C	Kinerja pegawai tidak optimal	KPU Kab/Kota Sulut	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai laporan dan ketersediaan anggaran	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak konsisten dilakukan	Operasional
4	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota dan KPU Kabupaten/Kota	Nilai akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota belum merata	Target kinerja dalam Renstra tidak dipahami secara menyeluruh, dan Perjanjian Kinerja hanya sekedar ditandatangani tanpa adanya evaluasi berkala terhadap upaya mencapai sasaran kinerja.	Kabag TPP Partisipasi, Hukum, Hupmas dan SDM/Kasubag Hk dan SDM	Tidak adanya sosialisasi/Internalisasi Renstra termasuk indikator-indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) <i>Key Performance Indicator</i> maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	internal	C	Target kinerja tidak tercapai	KPU Kab/Kota Sulut dan Kabupaten/Kota	Melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja	Target kinerja dalam Renstra tidak dipahami secara menyeluruh, dan Perjanjian Kinerja hanya sekedar ditandatangani tanpa adanya evaluasi berkala terhadap upaya mencapai sasaran kinerja.	strategis
5	Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kab/Kota	Masih ada temuan berdasarkan LHP BPK terhadap LK maupun hasil audit kinerja	Masih ada ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	Kabag KUL/Kasubag Keuangan	1) Kesalahpahaman terhadap regulasi keuangan 2) Tidak adanya SOP pengelolaan keuangan 3) Kartu kendali keuangan belum terlalu detail	internal	C	Adanya Tuntutan Ganti Rugi dan sanksi administratif	KPU Kab/Kota Sulut	1) Mengisi dan membahas kartukendali 2) Koordinasi dan pendampingan APIP	Masih ada ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	Keuangan dan Kepatuhan

6	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kab/Kota	Nilai evaluasi reformasi birokrasi masih belum sesuai harapan	8 area perubahan dan komponen penilaian dalam evaluasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten dan merata	Kabag Rendatin/ Kasubag Perencanaan	Internalisasi, Perencanaan, Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi tidak berjalan secara kontinyu	internal	C	Rendahnya Pencapaian nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KPU Kab/Kota Sulut	1) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi 2) Sosialisasi RB kepada KPU Kabupaten/Kota	8 area perubahan dan komponen penilaian dalam evaluasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten dan merata	Kepatuhan
7	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Masih ada KPU Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu melaksanakan program pemutahiran data pemilih	Manajemen program tahapan pemutakhiran pemilih tidak berjalan dengan baik	Kabag Rendatin/Ka subag Data dan Informasi	1) SDM PPDP, PPS dan PPK yang tidak melaksanakan tugas sesuai kerangka waktu; 2) Adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PPDP, PPS dan PPK	internal	C	Pelaksanaan tahapan tidak tepat waktu berpotensi adanya sanksi administrasi dan etik	KPU Kab/Kota Sulut	1) Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih; 2) Koordinasi dengan pihak terkait	Manajemen program tahapan pemutakhiran pemilih tidak berjalan dengan baik	Kepatuhan
8	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Tidak adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	Inisiatif kerjasamadengan instansi terkait rendah	Kabag Rendatin/Ka subag Perencanaan	Tidak dilakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap instansi mana saja yang perlu dilakukan kerjasama	internal	C	KPU Kab/Kota dianggap eksklusif dan program penguatan kelembagaan tidak berjalan dengan baik	KPU Kab/Kota Sulut	1) MoU/PKS dengan instansi terkait meskipun masih terbatas	Inisiatif kerjasamadengan instansi terkait rendah	Reputasi

9	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Tidak terlaksananya revisi terhadap rencana kerja dan anggaran	Satker hanya berharap revisi tingkat eselon I/KPURI dan tidak memaksimalkan kewenangan revisi oleh Satker/KPA	sda	Tidak dilakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kebutuhan anggaran untuk kinerja kegiatan lainnya	internal	C	Kinerja kegiatan tidak didukung dengan anggaran; Penyerapan anggaran lemah	KPU Kab/Kota Sulut	Revisi anggaran	Satker hanya berharap revisi tingkat eselon I/KPU RI dan tidak memaksimalkan kewenangan revisi oleh Satker/KPA	keuangan
10	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Laporan monev program dan anggaran masih kurang akuntabel dan tidak tepat waktu	KPU Kabupaten Kota belum konsisten menyusun dan melaporkan laporan monev program dan anggaran	sda	Tidak diprogramkannya pelaporan monev program anggaran dalam RPR sehingga mekanisme kontrol atau mengingatkan terkait waktu pelaporan tidak berjalan	internal	C	Evaluasi pencapaian sasaran program dan anggaran tidak terlaksana secara menyeluruh	KPU Kab/Kota Sulut dan KPU RI	KPU Kab/Kota mengingatkan KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal penyampaian laporan	KPU Kabupaten Kota belum konsisten menyusun dan melaporkan laporan monev program dan anggaran	Keuangan
11	Persentase target kinerja KPU Kab/Kota dan KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Masih ada komponen penilaian kinerja atau target kinerja yang tidak tercapai sesuai perjanjian kinerja	Sasaran kinerja tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan tidak maksimal	sda	Tidak adanya sosialisasi dan pembahasan sasaran kinerja dan perjanjian kinerja serta evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja	internal	C	Target kinerja tidak tercapai	KPU Kab/Kota dan KPURI	Menyusun Perjanjian Kinerja	Sasaran kinerja tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan tidak maksimal	Kebijakan

12	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Masih adanya pegawai yang terlambat mendapatkan pelayanan kepegawaian dan layanan kepegawaian yang tidak akurat	Pelayanan kepegawaian tidak sesuai mekanisme dan standar layanan	Kabag TPP, Partisipasi, Hukum, Humas dan SDM/ Kasubag Hukum danSDM	Tidak adanya SOP pelayanan kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian tepat waktu dan akurat	internal	C	Pelayanan kepegawaian terlambat dan tidak akurat	Pegawai sekretariat KPU Kab/Kota	Kartu kendali kepegawaian	Pelayanan kepegawaian tidak sesuai mekanisme dan standar layanan	Operasional
13	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Penegakan disiplin pegawai tidak dilaksanakan	Mekanisme pengawasan disiplin pegawai tidak berjalan	sda	1) Tidak adanya SOP pengawasan dan evaluasi kepatuhan pegawai terhadap ketentuan tentang disiplin pegawai. 2) Kartu kendali rekapitulasi kehadiran pegawai tidak dibahas dan diakumulasi setiap pertambahan bulan dalam setahun masa kerja. 3) Peraturan tentang disiplin pegawai belum dipahami dengan baik	internal	C	1) Inkonsistensi penegakan disiplin pegawai; 2) Pelanggaran disiplin pegawai tidak ditangani sejak level pelanggaran ringan (nantiteridentifikasi ketika level hukdis telah meningkat pada hukdis sedang atau berat	Sekretariat KPU Kab/Kota Sulut	Kartu kendali rekapitulasi kehadiran pegawai bulanan	Mekanisme pengawasan disiplin pegawai tidak berjalan	Kepatuhan dan Hukum

14	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Seleksi pegawai tidak terlaksana secara transparan dan akuntabel	Mekanisme masih kurang transparan	sda	Tidak dilaksanakan internalisasi peraturan seleksi	internal	C	pelaksanaan seleksi tidak transparan dan rentan protes	Sekretariat KPU Kab/Kota Sulut	Rapat persiapan seleksi	Mekanisme masih kurang transparan	Operasional
15	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) belum sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan tentang seleksi PPNPN belum dipahami secara utuh	sda	Tidak dilaksanakan internalisasi peraturan seleksi PPPK dan tidak dibuatkan SOP	internal	C	pelaksanaan seleksi tidak sesuai peraturan	Sekretariat KPU Kab/Kota Sulut	Pencetakan peraturan seleksi PPPK	Peraturan tentang seleksi PPNPN belum dipahami secara utuh	Hukum
16	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan periode masa jabatan (terlambat)	Tahapan seleksi tidak dilaksanakan dengan konsisten	sda	Perencanaan kegiatan seleksi tidak akurat. Dukungan administrasi terhadap Timsel tidak maksimal	internal	C	Fasilitas seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota terhambat	Timsel, Sekretariat Timsel, KPU RI	Bimtek dan Rakor Timsel dengan sekretariat	Tahapan seleksi tidak dilaksanakan dengan konsisten	Hukum dan Kepatuhan
17	Persentase Fasilitasi Jumlah Anggota KPU Kab/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	Proses PAW Anggota KPU Kab/Kota tidak sesuai dengan periode masa jabatan PAW	Adanya masalah pada calon pengganti antar waktu yang tidak diselesaikan dengan segera	sda	Kewenangan PAW berada di KPU RI; Tidak adanya standar waktu proses PAW	internal	C	Kekosongan posisi satu atau lebih komisioner yang berdampak pada kinerja lembaga	KPU, KPU Prov dan Kab/Kota aybs	Koordinasi dengan Biro SDM	Adanya masalah pada calon pengganti antar waktu yang tidak diselesaikan dengan segera	Hukum dan Kepatuhan

18	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Tidak semua pegawai datanya tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	Operator tidak mengupdate Data Kepegawaian secara berkala	sda	Kurang Pengawasan dari Kasubbag SDM ke Operator, Beban Kerja Operator Berlebihan, Tidak ada SOP yang jelas	Internal	C	Pelayanan Kepegawaian terhambat (Rekap Data, Kenpa)	PNS	Ada Kartu Kendali Kepegawaian	Operator tidak mengupdate Data Kepegawaian secara berkala	Kepatuhan dan Operasional
19	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	Tidak adanya rancangan kebijakan (SOP) di bidang kepegawaian	tidak adanya SOP di Bidang Kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian yang tepat dan akurat	sda	belum ada Rancangan kebijakan SOP sehingga tidak berjalan dengan baik	Internal	C	Pelayanan Kepegawaian belum berjalan dengan baik	Pegawai Sekretariat KPU Prov. Sulut	Kartu Kendali Kepegawaian	tidak adanya SOP di Bidang Kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian yang tepat dan akurat	Operasional
20	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	Jabatan fungsional tatakelola pemilu tidak terisi	belum dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu	sda	Implementasi di KPU Kab/Kota masih menunggu petunjuk KPU RI	internal	C	Target kinerja tidak tercapai	Pegawai Sekretariat KPU Prov. Sulut	Mengikuti SuratEdaran dan Dinas dari KPURI	belum dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu	Operasional
21	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	Badan adhoc terlambat dibentuk	Tahapan Badan adhoc oleh KPU Kab/Kota terhambat	sda	KPU Kabupaten/Kota tidak memahami alur tahapan dan perencanaannya tidak detail	Internal	C	Pemilu Serentak belum bisa dilaksanakan dengan baik karena belum terbentukny abadan adhoc	KPU Kabupaten/Kota	Melaksanakan Bimtek Rekrutmen Badan Ad Hoc	Tahapan Badan adhoc oleh KPU Kab/Kota terhambat	Kepatuhan

22	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kab/Kota	Pertanggungjawaban keuangan belum sesuai ketentuan	Kurang dipahaminya peraturan pengelolaan anggaran	Pengelola Keuangan	Peraturan cepat berubah dan tidak ada waktu melakukan pembahasan pengelolaan keuangan sesuai peraturanyang baru	internal	C	Adanya temuan hasil audit	KPU Kab/Kota	Bimtek Pengelolaan Keuangan	Kurang dipahaminya peraturan pengelolaan anggaran	Kepatuhan dan Hukum
23	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kab/Kota	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu	Keterlambatan penginputan data LPPA	Kabag KUL/Kasubag Keuangan	Data dukung terlambat dikumpul	internal	C	Nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan berkurang	Sekretariat KPU Kab/Kota Sulut	Melakukan monitoring kepada KPU Kabupaten Kota	Keterlambatan penginputan data LPPA	Kepatuhan
24	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Keterlambatan penginputan data	Kabag KUL/Kasubag Keuangan	Data dukung terlambat dikumpul	internal	C	Nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan berkurang	Sekretariat KPU Kab/Kota Sulut	Melakukan monitoring kepada KPU Kabupaten Kota	Keterlambatan penginputan data	Kepatuhan
25	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BMN belum dikelola sesuai dengan perundang-undangan	Belum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara KPU KOTA BITUNG	Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik	Proses Verifikasi atas Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN oleh KPU yang cukup lama	Internal	C	Proses Penghapusan BMN yang Rusak/Hilang/tidak ditemukan, kurang maksimal	KPU Kab/Kota / KPU Kabupaten/Kota	Melakukan Identifikasi BMN dan mengusulkan kembali Penetapan Status Penggunaan BMN ke KPU RI	Belum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara KPU KOTA BITUNG	Operasional

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN 2022

ANALISIS RISIKO / PETA RISIKO

PETA RISIKO								
Unit Pemilik Risiko :		KPU KOTA BITUNG						
Periode Penerapan :		2022						
No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	Tidak adanya anggaran untuk program riset pemilihan di tingkat KPU Kab/Kota	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Anggaran di masa Covid yang terbatas	Sedang	3	9	Tinggi
2	Pengetahuan terkait bidang penugasan masih belum merata	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Belum semua pegawai mengikuti Bimtek/Diklat terkait penugasannya, adanya perkembangan kebutuhan kompetensi teknis seiring dengan perkembangan teknologi informasiserta adanya mutasi ke bagianlainnya	Sedang	3	9	Tinggi
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan kerjapegawai tidak konsisten dilakukan	Sangat Kecil/Jarang	1	1) Tidak adanya dokumen SOP mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana; 2) Keterbatasan anggaran	Sedang	3	3	Rendah
4	Target kinerja dalam Renstra tidak dipahami secara menyeluruh, dan Perjanjian Kinerja hanya sekedar ditandatangani tanpa adanya evaluasi berkala terhadap upaya mencapai sasaran kinerja.	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Tidak adanya sosialisasi/Internal isasi Renstra termasuk indikator-indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicator maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Sedang	3	9	Tinggi
5	Masih ada ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	Kemungkinan Sedang/ Moderat	4	1) Kesalahpahaman terhadap regulasi keuangan 2) Tidak adanya SOP pengelolaan keuangan 3) Kartu kendali keuangan belum terlalu detail	Besar	4	16	Ekstrim

6	8 area perubahan dan komponen penilaian dalam evaluasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten dan merata	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Internalisasi, Perencanaan, Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi tidak berjalan secara kontinyu	Sedang	3	9	Tinggi
7	Manajemen program tahapan pemutakhiran pemilih tidak berjalan dengan baik	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	1) SDM PPDP, PPS dan PPK yang tidak melaksanakan tugas sesuai kerangka waktu; 2) Adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PPDP, PPS dan PPK	Besar	4	12	Tinggi
8	Inisiatif kerjasama dengan instansi terkait rendah	Kemungkinan Kecil	2	Tidak dilakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap instansi mana saja yang perlu dilakukan kerjasama	Sedang	3	6	sedang
9	Satker hanya berharap revisi tingkat eselon I/KPU RI dan tidak memaksimalkan kewenangan revisi oleh Satker/KPA	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Tidak dilakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kebutuhan anggaran untuk kinerja kegiatan lainnya	Sedang	3	9	Tinggi
10	KPU Kabupaten Kota belum konsisten menyusun dan melaporkan laporan monev program dan anggaran	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Tidak diprogramkannya pelaporan monev program anggaran dalam RPR sehingga mekanisme kontrol atau mengingatkan terkait waktu pelaporan tidak berjalan	Sedang	3	9	Tinggi
11	Sasaran kinerja tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan tidak maksimal	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Tidak adanya sosialisasi dan pembahasan sasaran kinerja dan perjanjian kinerja serta evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja	Sedang	3	9	Tinggi
12	Pelayanan kepegawaian tidak sesuai mekanisme dan standar layanan	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Tidak adanya SOP pelayanan kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian tepat waktu dan akurat	Sedang	3	9	Tinggi

13	Mekanisme pengawasan disiplin pegawai tidak berjalan	Kemungkinan Kecil	2	1) Tidak adanya SOP pengawasan dan evaluasi kepatuhan pegawai terhadap ketentuan tentang disiplin pegawai. 2) Kartu kendali rekapitulasi kehadiran pegawai tidak dibahas dan diakumulasi setiap pertambahan bulan dalam setahun masa kerja. 3) PP dan Peraturan kepala BKN tentang disiplin pegawai belum dipahami dengan baik	Sedang	3	6	sedang
14	Mekanisme masih kurang transparan	Kemungkinan sangat kecil	1	Tidak dilaksanakan internalisasi peraturan seleksi	Sedang	3	3	Rendah
15	Peraturan tentang seleksi PPNPN belum dipahami secara utuh	Kemungkinan Kecil	2	Tidak dilaksanakan internalisasi peraturan seleksi PPPK dan tidak dibuatkan SOP	Kecil	2	4	Rendah
16	Tahapan seleksi tidak dilaksanakan dengan konsisten	Kemungkinan Sedang/Moderat	2	Perencanaan kegiatan seleksi tidak akurat. Dukungan administrasi terhadap Timsel tidak maksimal	Sedang	2	4	Rendah
17	Adanya masalah pada calon pengganti antar waktu yang tidak diselesaikan dengan segera	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Kewenangan PAW berada di KPU RI; Tidak adanya standar waktu proses PAW	Sedang	1	3	Rendah
18	Operator tidak mengupdate Data Kepegawaian secara berkala	Kemungkinan Sedang/Moderat	2	Kurang Pengawasan dari Kasubbag SDM ke Operator, Beban Kerja Operator Berlebihan, Tidak ada SOP yang jelas	Sedang	2	4	Rendah
19	tidak adanya SOP di Bidang Kepegawaian yang menjadi panduan	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	belum ada Rancangan kebijakan SOP sehingga tidak	Sedang	3	9	Tinggi
	pelayanan kepegawaian yang tepat dan akurat			berjalan dengan baik				

20	belum dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu	Kemungkinan sangat kecil	1	Implementasi di KPU Kab/Kota masih menunggu petunjuk KPU RI	Kecil	2	2	Rendah
21	Tahapan Badan adhoc oleh KPU Kab/Kota terhambat	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	KPU Kabupaten/Kota tidak memahami alur tahapan dan perencanaannya tidak detail	Besar	4	12	Tinggi
22	Kurang dipahaminya peraturan pengelolaan anggaran	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Peraturan cepat berubah dan tidak ada waktu melakukan pembahasan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang baru	Besar	4	12	Tinggi
23	Keterlambatan penginputan data LPPA	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Data dukung terlambat dikumpul	Sedang	3	9	Tinggi
24	Keterlambatan penginputan data	Kemungkinan sangat kecil	1	Data dukung terlambat dikumpul	Sedang	3	3	Rendah
25	Belum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara KPU Kab/Kota Sulawesi Utara	Kemungkinan Kecil	2	Proses Verifikasi atas Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN oleh KPU yang cukup lama	Tidak Signifikan	1	2	Rendah
26	Pemahaman terhadap PKPU Kearsipan sebagai acuan untuk menyusun Keputusan tentang kearsipan masih kurang	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	PKPU tentang pengelolaan arsip belum terinternalisasi	Sedang	3	9	Tinggi
27	Belum adanya pengklasifikasian arsip	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Terbatasnya SDM serta belum adanya tenaga Arsiparis	Tidak Signifikan	1	3	Rendah
28	Sarana transportasi masih kurang, sementara itu beberapa sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik	Kemungkinan Kecil	2	Alokasi Anggaran Masih Kurang	Sedang	2	4	Rendah

29	Terjadinya kerusakan fasilitas perkantoran	Kemungkinan Kecil	2	Alokasi anggaran serta belum adanya kepemilikan tanah dan bangunan sendiri	Kecil	2	4	Rendah
30	Terjadinya kerusakan bagian gedung. Gudang masih dalam statussewa	Kemungkinan Sangat Kecil	2	Status kepemilikan Gedung dan Gudang yang masih di sewa/pinjam	Tidak Signifikan	1	2	Rendah
31	Tidak adanya staf yang ditugaskan untuk mencatat notula dan mendokumentasikan RPR	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Staf belum belum terlatih membuat notulensi	Sedang	3	9	Tinggi
32	Kurangnya koordinasi dan antisipasi gangguan keamanan Tahapan Pemilu/ Pemilihan	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Tidak adanya identifikasi potensi gangguan keamanan	Besar	4	12	Tinggi
33	Penanganan Pengaduan tidak berjalan dengan baik	Kemungkinan Kecil	2	SDM kurang memahami SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sedang	3	6	Sedang
34	Tidak Berjalannya tindak lanjut Rekomendasi BPK dan APIP	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Kurangnya Kesadaran dan rasa tanggung jawab atas rekomendasi yang akan ditindak lanjuti	Besar	4	12	Tinggi
35	1) belum optimal dalam pelaksanaan SPIP di satker. 2) Operator terlambat mengupdate Data	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Kurangnya Pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP	Sedang	3	9	Tinggi
36	Tidak dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja	Kemungkinan Kecil	2	Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja tidak teragendakan	Sedang	3	6	Sedang
37	Tidak ada identifikasi kebutuhan kompetensi SDM dan program serta anggaran peningkatan kompetensi terbatas	Kemungkinan Sangat Kecil	1	Program Peningkatan Kompetensi SDM bergantung pada program KPU RI	Sedang	3	3	Rendah

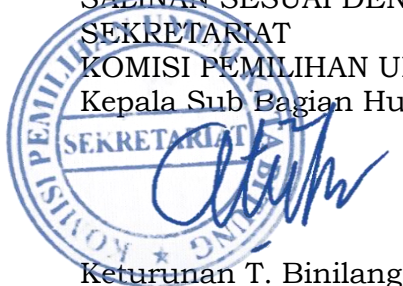
38	PNS tidak fokus pada penyelesaian studi. Konsentrasinya terpecah dengan perhatian terhadap kerja, apalagi disaat tahapan	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Jadwal tahapan pemilu/ pemilihan yang padat	Kecil	2	6	Sedang
39	Rencana aksi reformasi birokrasi tidak tersusun dengan baik	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Tugas Tim Reformasi Birokrasi kurang dipahami	Sedang	3	9	Tinggi
40	Tidak tertata anggaran untuk pelaksanaan riset dan penerbitan jurnal kepemiluan	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Keterbatasan anggaran	Sangat kecil	1	3	Rendah
41	SOP belum berjalan dengan baik	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	SDM kurang memahami SOP	Kecil	2	6	Sedang
42	Prinsip - prinsip pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan belum maksimal	Kemungkinan Kecil	2	Regulasi Pengelolaan Logistik kurang relevan dengan kondisi lapangan	Sedang	3	6	Sedang
43	Adanya hambatan terhadap pelaksanaan tahapan	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Tidak ada identifikasi faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tahapan, sehingga tidak ada langkah antisipasi	Besar	4	12	Tinggi
44	produk hukum yang dihasilkan belum sesuai	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	SDM kurang memahami penyusunan produk hukum	Kecil	2	6	Sedang
45	SOP Pengungkapan produk hukum tidak disosialisasikan	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	kurangnya koordinasi antar bagian dalam penyajian Produk Hukum	Kecil	2	6	Sedang
46	Terjadinya kesalahan distribusi logistik	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Regulasi yang tidak dipahami betul oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan, serta keterbatasan Penyedia	Besar	4	12	Tinggi

47	Belum maksimalnya kerjasama antara KPU dan Dukcapil	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Kerjasama antara KPU Kabupaten Kota dan Dukcapil tidak maksimal menyebabkan KPU Kab Kota kesulitan untuk mendapatkandata Pemilih Pemula terutama yg sudah merekam KTP el	Sedang	3	9	Tinggi
48	Tidak adanya sistem perlindungan Teknologi Informasi yang memadai	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Keterbatasan SDM untuk menciptakan sistem perlindungan aplikasi	Sedang	3	9	Tinggi
49	Sarana dan Prasarana di KPU Kab/Kota yang belum memadai	Kemungkinan kecil	2	Anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana terbatas	Sedang	2	4	rendah

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,
ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Tidak adanya anggaran untuk program riset kepemiluan ditingkat KPU Kab/Kota	9	30	8	Adanya minimal 1 kegiatan risetkepemiluan	100%
2	Pengetahuan terkait bidang penugasan masih belum merata	9	31	9	Persentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangpenugasannya	90%
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak konsisten dilakukan	3		3	-	-
4	Target kinerja dalam Renstra tidak dipahami secara menyeluruh, dan Perjanjian Kinerja hanya sekedar ditandatangani tanpa adanya evaluasi berkala terhadap upaya mencapai sasaran kinerja.	9	29	8	Persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi/internalisasi Renstra	75%
5	Masih ada ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	16	1	15	Persentase SOP dan kartu kendali pengelolaan keuangan yang disusun dan disosialisasikan	100%
6	8 area perubahan dan komponen penilaian dalam evaluasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten dan merata	9	28	9	Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang direalisasikan	90%
7	Manajemen program tahapan pemutakhiran pemilih tidak berjalan dengan baik	12	9	12	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi	100%
8	Inisiatif kerjasama dengan instansi terkait rendah	6	49	5	Persentase Satker yang melakukan kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	90%
9	Satker hanya berharap revisitingkat eselon I/KPU RI dan tidak memaksimalkan kewenangan revisi oleh Satker/KPA	9	22	9	Persentase Satker yang melakukan revisi DIPA	90%
10	KPU Kabupaten Kota belum konsisten menyusun dan melaporkan laporan monev program dan anggaran	9	21	8	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan melaporkan laporan Monev program dan anggaran secara berkala	90%
11	Sasaran kinerja tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan tidak maksimal	9	26	8	Persentase Satker yang mensosialisasikan sasaran kinerja	90%
12	Pelayanan kepegawaian tidak sesuai mekanisme dan standar layanan	9	27	9	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%

13	Mekanisme pengawasan disiplin pegawai tidak berjalan	6	48	6	Persentase Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Disiplin Pegawai	60%
14	Mekanisme masih kurang transparan	3	-	3	-	-
15	Peraturan tentang seleksi PPNPN belum dipahami secara utuh	4	-	4	-	-
16	Tahapan seleksi tidak dilaksanakan dengan konsisten	4	-	4	-	-
17	Adanya masalah pada calon pengganti antar waktu yang tidak diselesaikan dengan segera	3	-	3	-	-
18	Operator tidak mengupdate Data Kepegawaian secara berkala	4	-	4	-	-
19	tidak adanya SOP di Bidang Kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian yang tepat dan akurat	9	25	9	Jumlah Rancangan Kebijakan BidangKepegawaian	90%
20	belum dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu	2	-	4	-	-
21	Tahapan Badan adhoc oleh KPU Kab/Kota terhambat	12	6	12	Persentase KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan rekrutmen badanad hoc tepat waktu	100%
22	Kurang dipahaminya peraturanpengelolaan anggaran	12	2	12	Persentase pengelola keuangan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan	90%
23	Keterlambatan penginputan data LPPA	9	13	9	Persentase Satker yang menginput data LPPA tepat waktu	100%
24	Keterlambatan penginputandata	3	-	3	-	-
25	Belum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara KPU Kab/Kota SulawesiUtara	2	-	2	-	-
26	Pemahaman terhadap PKPU Kearsipan sebagai acuan untuk menyusun Keputusan tentang kearsipan masih kurang	9	24	8	Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan internalisasi PKPU Kearsipan	75%
27	Belum adanya pengklasifikasian arsip	3	-	3	-	-
28	Sarana transportasi masih kurang, sementara itu beberapa sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik	4	-	4	-	-
29	Terjadinya kerusakan fasilitas perkantoran	4	-	4	-	-
30	Pengelolaan logistik khususnya penghapusan logistik eks Pemilu / Pemilihan terhambat	8	35	8	Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan penghapusan logistik tepat waktu	90%

31	Penyajian Informasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dalam laporan logistik kurang memadai baik untuk KPU maupun Pihak luar	6	47	6	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi pengelolaan logistik yang memadai sesuai dengan kartu kendali dan/atau template yang disusun KPU Kab/Kota	100%
32	Terjadinya kesalahan distribusi logistik	12	12	9	Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan pengecekan jenis logistik sesuai daerah tujuan distribusi, sebelum distribusi dilaksanakan	100%
33	Belum maksimalnya kerjasama antara KPU dan Dukcapil	9	18	9	Persentase KPU Kab/Kota yang rutin berkoordinasi dengan Disdukcapil	100%
34	Tidak adanya sistem perlindungan Teknologi Informasi yang memadai	9	19	9	Persentase KPU Kab/Kota yang melaksanakan SOP perlindungan teknologi informasi	100%

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,
ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN 2022

KEGIATAN PENGENDALIAN / RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO LEVEL AKTIVITAS									
Unit Pemilik Risiko		: KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG							
Periode Penerapan		: 2022							
No	Indikator Risiko		Ops Penangan an	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penangu ng Jawab	Cad · Risiko o (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase SOP dan kartu kendali pengelolaan keuangan yang disusun dan disosialisasikan	100%	Tindakan segera dalam mengelola risiko (<i>unacceptable</i>)	<i>Menyusun dan mensosialisasikan SOP dan Kartu Kendali Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan</i>	Dokumen SOP dan laporan sosialisasi SOP; Dok Kartu kendali	1 paket dok	tahun	Kasubag Keuangan	
2	Persentase pengelola keuangan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan	90%	Tindakan dalam mengelola risiko (<i>issue</i>)	<i>Melaksanakan Bimtek/Diklat pengelolaan keuangan kepada seluruh pengelola keuangan</i>	Laporan pelaksanaan dan evaluasi Bimtek	1 dok	tahun	Kasubag Keuangan	
3	Persentase rekomendasi BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	sda	<i>Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP</i>	dokumen tindak lanjut	12 dok	bulan	Kasubag Keuangan	
4	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek pengadaan logistik Pemilu	100%	sda	<i>Melaksanakan Bimtek Pengadaan Logistik untuk mencegah kesalahan dalam proses pengadaan</i>	Dokumen koordinasi	15 dok	Setiap tahapan	Kasubag Umum dan Logistik	
5	Persentase tahapan yang dilakukan identifikasi potensimasalah yang dapat menghambat tahapan	80%	sda	<i>Identifikasi potensi masalah yang dapat menghambat tahapan pemilu/pemilihan dan merumuskan langkah pencegahan/preventif</i>	Dokumen hasil identifikasi potensi masalah/ Daftar Inventarisasi Masalah	1 paket	Tahun	Semua Subag	
6	Persentase KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan rekrutmen badan ad hoc tepat waktu	100%	sda	<i>Menyusun format pelaporan dan meminta laporan berkala proses rekrutmen badan ad hoc</i>	Laporan progres kegiatan rekrutmen badan ad hoc	1 paket laporan	tahapan	Kasubag Hukum dan SDM	
7	Persentase staf yang terlibat dalam Helpdesk pelayanan calon peserta pemilu,	100%	sda	<i>Menempatkan SDM yang memiliki kompetensi pada helpdesk fasilitasi</i>	Laporan Bimtek Petugas Helpdesk Pelayanan	1 dok	tahapan	Kasubag Teknis dan Hupmas	

16	Persentase KPU Kab/Kota yang mengikuti Bimtek/Rakor/Sosialisasi Tahapan dan Petunjuk/Pedoman Teknis	100%	sda	<i>Melaksanakan Bimtek/Rakor/Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan dan Pedoman Teknis kepada KPU Kab/Kota</i>	Laporan Pelaksanaan	1 paket	Tahapan	Kasubag Teknis dan Hupmas	
17	Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan identifikasi kebutuhan logistik dan estimasi anggaran serta dilakukan reviu oleh KPU atau KPU Kab/Kota	100%	sda	<i>Mematangkan proses perencanaan, dan pengelolaan logistik</i>	Dokumen perencanaan logistik	15 dok	Tahunan	Kasubag Umum dan Logistik	
18	Persentase KPU Kab/Kota yang rutin berkoordinasi dengan Disdukcapil	100%	sda	<i>Melakukan koordinasi rutin dalam rangka pemutakhiran data pemilih dengan Disdukcapil</i>	Dokumen laporan hasil koordinasi	15 dok	bulanan	Kasubag Data dan Informasi	
19	Persentase KPU Kab/Kota yang melaksanakan SOP perlindungan teknologi informasi	100%	sda	<i>Menyusun standar keamanan teknologi informasi dan melakukan monitoring</i>	Dokumen SOP dan kartu kendali monitoring	15 dok	Tahunan	Kasubag Data dan Informasi	
20	Persentase KPU Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis Advokasi Penanganan Sengketa	90%	sda	<i>Melaksanakan Bimtek Penanganan Sengketa</i>	Laporan Bimtek	1 dok	Tahunan	Kasubag Hukum dan SDM	
21	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan melaporkan laporan Monev program dan anggaran secara berkala	90%	sda	<i>Pelaporan monev realisasi program dan anggaran secara berkala</i>	Laporan Monev program dan anggaran	12 dok	bulanan	Kasubag Perencanaan	
22	Persentase Satker yang melakukan revisi DIPA	90%	sda	<i>Melakukan optimalisasi anggaran dengan revisi DIPA untuk mengakomodir/memperluas jangkauan kegiatan</i>	Dokumen revisi DIPA	Minima 11 dok setiap semester	semesteran	Kasubag Perencanaan	
23	Persentase Satker yang menyusun rencana aksi reformasi birokrasi	90%	sda	<i>Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi</i>	Laporan rencana aksi RB	16 satker	tahunan	Kasubag Perencanaan	

24	Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan internalisasi PKPU Kearsipan	75%	sda	Melakukan internalisasi PKPU Kearsipan	Laporan pelaksanaan kegiatan internalisasi	1 dok	tahun	Kasubag Hukum dan SDM	
25	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	90%	sda	Menyusun SOP bidang kepegawaian	Dokumen SOP	1 paket dok	tahun	Kasubag Hukum dan SDM	
26	Persentase Satker yang mensosialisasikan sasaran kinerja	90%	sda	Sosialisasi sasaran kinerja tiap Satker	Dokumen tasi sosialisasi	16 Satker	tahun	Kasubag Perencanaan	
27	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	sda	Menyusun kartu kendali layanan kepegawaian	dokumen kartu kendali	1 paket dok	tahun	Kasubag Hukum dan SDM	
28	Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang direalisasikan	90%	sda	1) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi 2) Menyusun rencana aksi RB 3) Melakukan evaluasi capaian RB dengan pengisian LKE	SK Tim RB, SK Rencana Aksi RB, Laporan Evaluasi Capaian RB	2 SK 2 LKE	semester	Kasubag Perencanaan	
29	Persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi/internalisasi Renstra	75%	sda	Sosialisasi/internalisasi Renstra	Laporan pelaksanaan Sosialisasi / internalisasi Renstra	1 dok	tahun	Kasubag Perencanaan	
30	Adanya minimal 1 kegiatan riset kepemiluan	100%	sda	Melakukan revisi anggaran/ Pengusulan program riset ke KPU RI/ Kerjasama dengan stakeholder / riset mandiri/ riset PNS yg tugas belajar	Laporan Hasil Riset Kepemiluan	1 dok	tahun	Kasubag Perencanaan	
31	Persentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek sesuai bidang penugasannya	90%	sda	Melaksanakan Bimtek/Diklat terkait Kompetensi Penugasan	Laporan pelaksanaan Diklat/Bimtek pada 3 Bagian/bidang penugasan	3 dok	tahun	Kasubag Hukum dan SDM	
32	Persentase RPR yang memiliki risalah/notula rapat	75%	sda	Penjadwalan staf untuk menyusun risalah/notula RPR	Jadwal penugasan petugas penyusun notula	12 dok	bulan	Kasubag Umum dan Logistik	

33	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang mengkonsultasikan draft penetapan Dapil	100%	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Suplementary Issue)	KPU Kab/Kota melakukan pemutakhiran data wilayah dan berkoordinasi berkala secara intensif dengan pemerintah daerah terkait data pemekaran wilayah administrasi baru, serta mengkonsultasikan draft Dapil kepada KPU Kab/Kota	Tersusunnya Laporan Pemetaan Dapil dan Tersedianya Data Akurat Untuk Penyusunan Dapil Pemilu Tahun 2024	1 paket	tahapan	Kasubag Teknis dan Hupmas	
34	Persentase dokumen rencana penyusunan pedoman/desain/template	90%	sda	Melakukan analisa kebutuhan pada setiap tahapan	Dokumen hasil analisa kebutuhan	1 paket	tahunan	Kasubag Teknis dan Hupmas	
35	Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan penghapusan logistik tepat waktu	90%	sda	Menyiapkan template yang berbasis Aplikasi sebagai data pendukung dan sarana monitoring	Template berbasis aplikasi	15 dok	Tahunan	Kasubag Umum dan Logistik	
36	-	-	sda	Sosialisasi/internalisasi Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat	Laporan pelaksanaan sosialisasi/internalisasi tata cara pengaduan	16 satker	tahunan	Kasubag Hukum dan SDM	
37	Persentase Satker yang melakukan evaluasi semesteran terhadap capaian kinerja berdasarkan Renstra, IKU dan PK	100%	sda	Evaluasi capaian kinerja	Laporan evaluasi capaian kinerja	16 satker	semesteran	Kasubag Perencanaan	
38	Persentase PNS yang melanjutkan studi yang melaporkan progres studinya	80%	sda	Pelaporan progres studi	Laporan progres studi	2 dok	semesteran	Kasubag Hukum dan SDM	
39	Jumlah Surat Keputusan yang disusun sesuai dengan SOP	90%	sda	Monitoring kepatuhan terhadap SOP	kartu kendali kepatuhan terhadap SOP	1 dok		Kasubag Hukum dan SDM	
40	Persentase Badan ad hoc yang mengikuti Bimtek pengelolaan logistik	100%	sda	Mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat satker	Laporan	1 dok	Tahunan	Kasubag Umum dan Logistik	

41	Persentase surat keputusan yang disusun sesuai ketentuan dan SOP	90%	sda	<i>Mengendalikan penyusunan keputusan sesuai SOP</i>	Kartu kendali kepatuhan SOP	1 dok	bulan	Kasubag Hukum dan SDM	
42	Persentase Satker yang menyusun SOP pengunggahan produk hukum ke dalam JDIH dan mensosialisasikannya	90%	sda	<i>Penyusunan SOP Pengunggahan Produk Hukum di laman JDIH</i>	Dokumen SOP	16 satker	Tahunan	Kasubag Hukum dan SDM	
43	Persentase KPU Kab/Kota yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PAW	100%	sda	<i>Melakukan langkah-langkah koordinatif terjadwal segera setelah menerima Surat Pemberitahuan dari DPRD Kab/ Kota</i>	Proses Pengusulan Calon PAW Tepat waktu	1 paket	tahunan	Kasubag Teknis dan Hupmas	
44	Adanya optimalisasi anggaran untuk memenuhi volume kegiatan Pendidikan Pemilih yang dibutuhkan	80%	sda	<i>Melakukan optimalisasi/ revisi anggaran untuk memenuhi volume kegiatan pendidikan pemilih yang dibutuhkan</i>	Dokumen revisi anggaran	1 paket	Tahunan	Kasubag Teknis dan Hupmas	
45	Persentase dokumen SOP PPID KPU Sulut yang dibutuhkan dan tersusun	80%	sda	<i>Melakukan identifikasi kebutuhan SOP PPID dan melakukan penyusunan SOP</i>	Dokumen SOP	1 paket	Tahunan	Kasubag Teknis dan Hupmas	
46	Persentase kegiatan Bimtek kehumasan/ In Office training/ Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Bakohumas yang terlaksana	-	sda	<i>Melaksanakan Bimtek/ In officetraining</i>	Dokumen laporan	1 paket	Tahunan	Kasubag Teknis dan Hupmas	
47	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi pengelolaan logistik yang memadai sesuai dengan kartu kendali yang disusun KPU Kab/Kota	100%	sda	<i>Pelaporan berkala informasi pengelolaan logistik dari KPU Kab/ Kota</i>	Laporan berkala	15 dok	Tahunan	Kasubag Umum dan Logistik	
48	Persentase Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Disiplin Pegawai	60%	sda	<i>Melakukan monitoring dan pengendalian penegakan disiplin pegawai</i>	Pelaporan kartu kendali hukdis	1 dok	bulan	Kasubag Hukum dan SDM	

49	Persentase Satker yang melakukan kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	90%	sda	<i>Kerja sama dengan stakeholder</i>	Dokumen NK atau PKS	1 dok x 15 Satker	tahunan	Kasubag Perencanaan	
----	---	-----	-----	--------------------------------------	---------------------	-------------------	---------	---------------------	--

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Keturunan T. Binilang